

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan besar terhadap pola kerja birokrasi modern (Indrajit, 2016). Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini perlahan diarahkan menuju sistem berbasis digital agar pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, lebih akurat, lebih transparan, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan, sejalan dengan agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018). Perubahan ini tidak hanya menyentuh pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat, tetapi juga berpengaruh kuat terhadap tata kelola internal organisasi perangkat daerah, termasuk pengelolaan barang milik daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi administrasi menjadi kebutuhan penting karena pemerintah dituntut mampu bekerja secara efisien, terbuka, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Di era pemerintahan modern, barang milik daerah bukan sekadar aset fisik yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, melainkan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, terencana, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Setiap barang yang dibeli, diterima, dipindahkan, digunakan, dipelihara, atau dihapus harus dicatat dengan benar agar data yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jika pencatatan tidak dilakukan secara tertib, maka akan muncul berbagai persoalan seperti data yang tidak sinkron, kesulitan inventarisasi, keterlambatan pelaporan, hingga rendahnya

akuntabilitas pengelolaan aset (Mardiasmo, 2018). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus mengikuti sistem yang mampu menjamin ketepatan, keteraturan, dan pengawasan yang baik.

Secara normatif, pemerintah telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai pengelolaan barang milik daerah (Sahrullah dkk., 2020). Salah satu regulasi yang menjadi pijakan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa barang milik daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran peraturan ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah dipandang sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan kualitas pelayanan pemerintah, serta untuk menunjang stabilitas keuangan negara/daerah.

Selain itu, pemerintah juga memperbarui ketentuan teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam regulasi ini, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah secara komprehensif meliputi siklus administrasi yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian.

Kehadiran regulasi yang terus diperbarui menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan urusan yang dinamis dan membutuhkan ketelitian tinggi. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan aturan, tetapi juga harus memastikan bahwa perangkat daerah mampu mengimplementasikan aturan tersebut secara konsisten. Dalam praktik birokrasi, sering kali terdapat jarak antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, sebab adopsi sistem teknologi baru tanpa disertai penguatan kapasitas adaptasi dari para penggunanya justru berpotensi memicu perlambatan kinerja administratif (Cairney, 2020). Secara ideal, semua aset daerah harus tercatat lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri. Akan tetapi, dalam kenyataan, masih banyak ditemukan perbedaan data antara catatan administrasi dan kondisi fisik barang yang sebenarnya, yang menandakan bahwa keberhasilan migrasi sistem sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan verifikasi data di lapangan (E-Prints IPDN, 2023). Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset masih membutuhkan pembenahan melalui pendekatan yang lebih modern, karena evaluasi proses tata kelola bukan sekadar menilai formalitas keluaran (*output*) melainkan menguji substansi manfaat nyata bagi kelompok sasaran (Dunn, 2018).

Untuk memperjelas dasar regulasi dan konteks penerapan e-BMD dalam pengelolaan barang milik daerah, berikut disajikan tabel ringkasan sebagai gambaran umum.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi dalam pengelolaan aset. Salah satu bentuk

digitalisasi tersebut adalah aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah atau e-BMD. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses pencatatan, inventarisasi, penatausahaan, dan pelaporan barang milik daerah secara elektronik. Dengan sistem ini, data aset tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen manual yang rawan tercecer, terlambat diperbarui, atau sulit diintegrasikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap efisiensi beban kerja administratif aparatur di perangkat daerah (Hidayat & Pratama, 2023). Keberadaan e-BMD diharapkan mampu membantu pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, cepat, dan transparan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Secara konseptual, e-BMD merupakan instrumen penting dalam mendukung tata kelola aset berbasis digital. Sistem ini memungkinkan data barang milik daerah dicatat secara lebih sistematis sehingga dapat memudahkan proses penelusuran aset, pembaruan data, serta penyusunan laporan melalui sinkronisasi data fisik dengan input digital secara *real-time* (Sahrullah dkk., 2020). Dalam rilis resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menegaskan bahwa e-BMD diterapkan secara menyeluruh di setiap instansi daerah untuk menyinergikan data aset lokal agar terakumulasi secara terstruktur dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa e-BMD tidak hanya diposisikan sebagai alat administrasi internal, tetapi juga sebagai bagian dari integrasi data pemerintahan yang lebih luas.

Terdapat kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal yang diamanatkan regulasi dengan fenomena empiris yang terjadi di lapangan. Penggunaan aplikasi

e-BMD di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi berbagai permasalahan substantif, teknis, maupun sumber daya manusia. Berdasarkan pra-observasi dan temuan awal di lapangan, data permasalahan dalam pengelolaan e-BMD di instansi tersebut mencakup beberapa poin kritis berikut:

1. Kesenjangan Data Digital dan Kondisi Fisik Aset di Lapangan (*Verificational Gap*)

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro mengelola aset operasional berskala besar dan dinamis, seperti sarana prasarana pasar daerah dan peralatan penunjang UMKM. Dalam praktiknya, pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB B dan KIB C) di aplikasi e-BMD sering kali tidak sejalan dengan keberadaan fisik barang secara *real-time*. Hal ini disebabkan oleh minimnya kontinuitas verifikasi fisik secara berkala, sehingga status kerusakan, pergeseran, atau penyusutan aset di lapangan terlambat diperbarui dalam sistem.

2. Tingginya Frekuensi Kesalahan Input Data (*Human Error*) dan Kerumitan Modul

Dalam proses pembukuan elektronik, masih ditemukan kesalahan operator dalam menentukan kodefikasi barang serta penetapan nilai kapitalisasi aset. Keterbatasan pemahaman terhadap struktur modul aplikasi serta tekanan batas waktu pelaporan (*deadline*) menyebabkan akurasi data input mengalami deviasi.

3. Keterbatasan Fitur Aplikasi terhadap Pengelolaan Aset Dinamis/Hibah

Fitur aplikasi e-BMD yang tersedia saat ini masih bersifat generik. Aplikasi belum dilengkapi sub-modul pelacakan posisi/koordinat (*geotagging*) maupun pemantauan kondisi aset hibah yang diserahkan kepada kelompok masyarakat atau pelaku UMKM. Akibatnya, petugas terpaksa melakukan pencatatan manual tambahan di luar aplikasi e-BMD untuk mendokumentasikan sebaran aset dinamis tersebut.

4. Kesenjangan Adaptasi Digital (*Digital Divide*) dan Ketimpangan Beban Kerja

Terdapat kesenjangan kemampuan literasi teknologi yang cukup mencolok lintas generasi aparatur (antara operator senior dan junior). Aparatur senior mengalami kesulitan navigasi menu pada antarmuka aplikasi, yang berimplikasi pada penumpukan beban kerja input data (*workload centralization*) secara tidak proporsional kepada Bendahara Barang Utama demi mengejar batas waktu pelaporan.

5. Kendala Infrastruktur Jaringan dan Kinerja Server Pusat (*System Lag*)

Pada jam sibuk pelaporan (pukul 09.00–14.00 WIB) atau menjelang penutupan periode bulanan/tahunan, aplikasi e-BMD kerap mengalami perlambatan waktu tunggu (*loading time*) hingga kegagalan proses simpan (*error*) saat mengunggah dokumen Berita Acara (BA). Hal ini disebabkan oleh tingginya lonjakan arus data (*data traffic congestion*) pada server pusat BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Untuk memperjelas dasar regulasi dan permasalahan pengelolaan e-BMD, berikut disajikan ringkasan tabel konteks dan peta permasalahan di lokasi penelitian:

Tabel 1.1

Permasalahan Pengelolaan e-BMD di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro

Aspek Pengelolaan Aset	Kondisi Ideal (Normatif)	Realita & Data Masalah di Lapangan	Implikasi / Dampak Administrasi	Relevansi dengan e-BMD
Pembukuan & Input Data	Data aset tercatat akurat, mutakhir, dan sesuai kodefikasi.	Terjadi <i>human error</i> dalam pengisian kodefikasi dan kapitalisasi aset.	Risiko kesalahan penyajian laporan LRA/LKPD.	Memerlukan penyederhanaan alur dan kepastian modul.
Inventarisasi Fisik	Data digital e-BMD selaras dengan kondisi fisik barang di lapangan.	Selisih/ketidaksesuaian catatan KIB B & C digital dengan kondisi riil aset pasar/UMKM.	Keterlambatan pembaruan data aset rusak/hilang.	Perlunya verifikasi & sinkronisasi fisik-digital secara berkala.
Kecukupan Fitur	Aplikasi mengakomodasi seluruh karakteristik aset daerah.	Belum ada sub-modul pelacakan koordinat/monitoring aset hibah UMKM.	Petugas harus membuat rekap manual ganda di luar sistem.	Diperlukan kustomisasi fitur pelacakan aset dinamis.
Pemerataan Adaptasi SDM	Seluruh operator memiliki	Kesenjangan adaptasi digital lintas generasi (senior vs	Beban kerja input data menumpuk	Diperlukan pendampingan (<i>buddy system</i>)

	tingkat kemudahan akses dan kemampuan seimbang.	junior).	pada Bendahara Barang Utama.	& diklat bertingkat.
--	---	----------	---------------------------------------	-------------------------

(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi e-BMD tidak otomatis menjamin pengelolaan aset berjalan optimal tanpa adanya evaluasi yang komprehensif. Evaluasi kebijakan menjadi sangat krusial untuk mengukur apakah aplikasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata (*useful*) atau justru memicu hambatan administratif baru bagi para penggunanya.

Untuk membedah kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn (2018) yang mencakup 6 (enam) kriteria utama:

1. Efektivitas: Menilai sejauh mana e-BMD mampu mewujudkan keakuratan data inventarisasi dan tertib administrasi.
2. Efisiensi: Menilai penghematan waktu, biaya, dan tenaga kerja dibandingkan metode manual.
3. Kecukupan: Menilai apakah fitur e-BMD sudah memadai dalam menyelesaikan persoalan aset dinamis di lapangan.
4. Keadilan: Menilai kesetaraan aksesibilitas dan beban kerja antar-operator di seluruh unit kerja.
5. Responsivitas: Menilai kecepatan daya tanggap sistem serta keandalan layanan *helpdesk* saat terjadi gangguan teknis.

6. Ketepatan: Menilai kemanfaatan strategis jangka panjang e-BMD dalam menunjang akuntabilitas keuangan daerah.

Di Kabupaten Bojonegoro, penerapan e-BMD menjadi salah satu langkah penting dalam upaya modernisasi tata kelola aset daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa aplikasi e-BMD akan membantu menyinergikan data barang milik daerah agar lebih akurat dan terstruktur, yang mana implementasinya diterapkan secara menyeluruh di setiap instansi daerah (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). Kehadiran aplikasi ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan sistem yang lebih digital, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat pengendalian aset sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

Keberadaan aplikasi digital tidak otomatis menjamin bahwa pengelolaan aset akan berjalan optimal. Banyak sistem informasi pemerintah yang secara formal sudah tersedia, tetapi masih menghadapi kendala pada tahap penggunaan. Permasalahan dapat muncul dari sisi kesiapan sumber daya manusia, kemampuan operator, kestabilan jaringan, kelengkapan perangkat pendukung, hingga kecocokan desain sistem dengan kebutuhan kerja di lapangan. Dalam banyak kasus, aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pekerjaan justru menimbulkan beban baru jika pengguna belum memahami cara kerjanya atau jika alur aplikasi terlalu kompleks, sebab pemanfaatan teknologi tanpa disertai penguatan kapasitas adaptasi penggunaanya justru berpotensi memicu perlambatan kinerja administratif (*Cairney, 2020*). Karena itu, implementasi e-BMD tidak

cukup dilihat dari ketersediaan sistem, tetapi harus dinilai dari manfaat nyata yang dirasakan oleh pengguna.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu perangkat daerah yang sangat relevan untuk diteliti karena memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah pada unit kerjanya. Dinas ini memiliki berbagai aset operasional seperti peralatan kantor, inventaris, perlengkapan kerja, dan sarana penunjang lainnya yang harus dikelola secara baik, termasuk tingginya volume aset operasional penunjang pelayanan pasar dan UMKM (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, 2026). Aset-aset tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan pencatatan, pembaruan, dan pelaporan secara tepat.

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset, bendahara barang dan aparatur terkait menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas ketertiban administrasi. Mereka harus memastikan bahwa data fisik barang sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Jika ada perubahan kondisi barang, maka data harus segera diperbarui agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Pada praktiknya, proses ini tidak selalu mudah. Perbedaan pemahaman, keterbatasan waktu, kesalahan input, dan kebutuhan koordinasi antarbagian sering kali menjadi hambatan yang harus dihadapi, yang memperlihatkan bahwa keberhasilan migrasi sistem sangat dipengaruhi oleh konsistensi bimbingan teknis dan tingkat kedisiplinan verifikasi

data di lapangan (*E-Prints IPDN, 2023*). Oleh karena itu, penggunaan aplikasi e-BMD pada level operasional perlu dievaluasi secara cermat.

Evaluasi terhadap e-BMD menjadi penting karena keberhasilan kebijakan digital tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidaknya sistem. Yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut benar-benar membantu menyelesaikan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, evaluasi diperlukan untuk melihat apakah e-BMD sudah efektif dalam mendukung penatausahaan barang milik daerah, apakah penggunaan sistem ini efisien dari sisi waktu dan tenaga, apakah fitur-fitur yang tersedia sudah memadai, apakah akses pengguna sudah merata, apakah sistem responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan apakah penerapan e-BMD memang merupakan pilihan yang tepat untuk mewujudkan tertib administrasi aset.

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai. Evaluasi bukan hanya melihat apakah kebijakan dijalankan, tetapi juga apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah (Dunn, 2018). Kriteria evaluasi yang dikemukakan Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Enam kriteria ini sangat relevan untuk menilai penggunaan e-BMD karena masing-masing dapat digunakan untuk membaca kualitas implementasi aplikasi dalam konteks organisasi pemerintahan daerah.

Efektivitas penting untuk melihat sejauh mana e-BMD mampu membantu tertib administrasi dan pencatatan aset melalui sinkronisasi data fisik

dengan input digital secara real-time (Sahrullah dkk., 2020). Efisiensi dibutuhkan untuk menilai apakah sistem ini benar-benar menghemat waktu dan tenaga serta memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi beban kerja administratif aparatur (Hidayat & Pratama, 2023). Kecukupan diperlukan untuk mengetahui apakah fitur-fitur yang tersedia sudah mampu memecahkan hambatan navigasi menu dan relevansi kecukupan solusi fitur digital dalam pengelolaan barang milik daerah (Sari, 2023). Pemerataan atau dimensi keadilan digunakan untuk melihat apakah seluruh pengguna yang berwenang memperoleh kesetaraan akses (*accessibility*) dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sistem (Pratama & Wulandari, 2024). Responsivitas penting untuk menilai apakah aplikasi mampu menjawab kebutuhan, mengukur pengaruh faktor kestabilan jaringan terhadap penerimaan teknologi informasi, serta merespons kendala pengguna secara memadai (Wijaya dkk., 2022). Adapun ketepatan diperlukan untuk menilai apakah tujuan digitalisasi aset melalui e-BMD memang merupakan langkah yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi daerah dalam menyelesaikan akar permasalahan publik (Dunn, 2018).

Jika dilihat dari konteks lapangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena dinas ini merupakan salah satu perangkat daerah yang aktif menggunakan aplikasi e-BMD dalam kegiatan pengelolaan asetnya. Penerapan e-BMD di dinas ini diharapkan mampu membantu proses inventarisasi dan administrasi barang milik daerah agar lebih tertib dan terintegrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem digital sering kali memunculkan dinamika tersendiri. Pengguna harus menyesuaikan diri dengan prosedur baru, melakukan input data secara cermat, dan

memastikan bahwa data yang masuk ke sistem benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang memiliki karakteristik operasional aset yang tinggi (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, 2026).

Penelitian ini juga penting karena masih terbatas kajian yang membahas evaluasi aplikasi e-BMD pada level perangkat daerah secara spesifik. Banyak penelitian membahas pengelolaan aset daerah secara umum, tetapi belum semua menyoroti pengalaman pengguna (user experience) dalam mengoperasikan aplikasi serta hambatan yang muncul dalam praktik. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dengan memberikan gambaran empiris mengenai implementasi e-BMD dalam konteks birokrasi lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan pengelola sistem agar aplikasi e-BMD semakin sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menyangkut penciptaan nilai tambah bagi pemerintah daerah guna menegaskan kewajiban pengelolaan aset secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020). Aset yang tertata dengan baik akan memudahkan proses perencanaan kebutuhan, pengendalian pemanfaatan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi fisik (DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024). Karena itu, pengelolaan aset yang baik merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, aplikasi e-BMD seharusnya mampu

menjadi instrumen yang mendukung terciptanya data aset yang lebih tertib, akurat, dan berguna bagi kebijakan pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya, proses digitalisasi sering kali memunculkan tantangan baru yang tidak selalu mudah diatasi. Pergeseran dari sistem manual ke sistem elektronik menuntut adanya adopsi prosedur, peningkatan keterampilan pengguna, serta perbaikan alur kerja organisasi. Apabila salah satu unsur tersebut belum siap, maka penerapan aplikasi berpotensi menimbulkan hambatan baru dalam pekerjaan administratif karena adopsi teknologi tanpa penguatan kapasitas adaptasi rentan memicu perlambatan kinerja (Cairney, 2020). Oleh sebab itu, evaluasi menjadi penting bukan hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga untuk memahami proses penerapan sistem secara menyeluruh.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan, William N. Dunn menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu program harus mempertimbangkan apakah program tersebut benar-benar mampu menyelesaikan persoalan publik yang dihadapi (Dunn, 2018). Artinya, aplikasi e-BMD tidak cukup dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi harus diuji manfaat nyatanya dalam mendukung tertib administrasi aset. Jika sistem telah tersedia tetapi belum digunakan secara optimal, maka tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, penelitian ini akan membantu menunjukkan apakah e-BMD sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Pemilihan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat daerah ini memiliki kebutuhan administrasi aset yang cukup kompleks

guna menunjang pelayanan pasar dan UMKM (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, 2026). Aset yang dikelola tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal kantor, tetapi juga untuk mendukung pelayanan publik yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu, ketepatan pencatatan, kecepatan pembaruan data, dan konsistensi penggunaan aplikasi menjadi sangat penting. Jika pengelolaan aset di unit ini berjalan baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dinas secara keseluruhan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai evaluasi aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memiliki urgensi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi aplikasi, manfaat yang dirasakan pengguna, hambatan yang muncul, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan ke depan. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola barang milik daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah mendalam dengan judul: **"Evaluasi Aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) Di Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro"**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) diterapkan dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi ini penting dilakukan karena aplikasi e-BMD diharapkan mampu menyinergikan data aset secara sistematis, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, serta mendukung tertib administrasi aset daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah evaluasi aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro?.

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah utama yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melaksanakan kajian ilmiah. Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga antara masalah dan tujuan memiliki keterkaitan yang logis, runtut, dan saling mendukung. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya sebatas menggambarkan penggunaan aplikasi secara umum, tetapi juga untuk melihat apakah e-BMD benar-benar berfungsi sebagai alat bantu yang efektif dalam memperlancar proses inventarisasi aset daerah. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana sistem digital bekerja dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara praktis. Dalam penelitian ini, kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan digital, manajemen aset daerah, dan penggunaan sistem informasi pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin mengkaji implementasi aplikasi pemerintahan berbasis elektronik pada level daerah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara kebijakan digitalisasi dengan pengalaman pengguna di lapangan. Dalam konteks ini, teori evaluasi kebijakan dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana sebuah aplikasi pemerintahan mampu menjawab kebutuhan kerja aparatur. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan teori maupun kajian lanjutan dalam bidang administrasi publik dan sistem informasi pemerintahan.

b). Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap penerapan aplikasi e-BMD, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan.
- 2) Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperbaiki proses inventarisasi aset agar lebih efektif, efisien, dan akurat.
- 3) Bagi bendahara barang, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran mengenai kendala yang sering muncul dalam penggunaan aplikasi serta solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk memperlancar pekerjaan administratif.
- 4) Bagi pengembang sistem atau pihak teknis yang menangani aplikasi e-BMD, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan fitur, tampilan, dan alur penggunaan agar lebih mudah dipahami dan dioperasikan.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi awal untuk mengembangkan penelitian yang sejenis, baik pada objek

penelitian yang berbeda maupun dengan pendekatan teori yang berbeda pula.

Secara umum, kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, tidak hanya dalam tataran akademik, tetapi juga dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung tertib administrasi aset berbasis digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan pengembangan sistem informasi aset yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum tentang struktur dan alur penulisan skripsi yang akan dilakukan. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai isi dan susunan penelitian secara keseluruhan, sehingga memudahkan pemahaman terhadap kerangka pemikiran dan metode yang digunakan. Dalam proposal penelitian ini, sistematika pembahasan disusun berdasarkan standar penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro, dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab utama dengan struktur sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, serta tinjauan pustaka. Bab ini menjadi dasar awal yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, fokus masalah yang dikaji, manfaat penelitian, dan kajian awal

terhadap teori maupun penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian ini, Bab I memaparkan konteks evaluasi aplikasi e-BMD pada proses inventarisasi barang milik daerah di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, terutama teori evaluasi kebijakan yang dijadikan dasar analisis. Selain itu, bab ini juga membahas konsep pengelolaan barang milik daerah, aplikasi e-BMD, evaluasi sistem informasi, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini disusun untuk membangun kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam menganalisis data di lapangan agar pembahasan tetap fokus dan terarah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang cara kerja peneliti di lapangan. Karena penelitian ini bertujuan menggali pengalaman dan penilaian pengguna secara mendalam, maka metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Bab ini juga menjelaskan alasan pemilihan informan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan bagaimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta bagaimana keabsahan data dijaga melalui triangulasi.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, kemudian membahasnya secara mendalam berdasarkan teori yang telah disusun sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan bagaimana aplikasi e-

BMD digunakan oleh bendahara barang, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana efektivitas aplikasi tersebut dalam mendukung proses inventarisasi barang milik daerah. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori evaluasi kebijakan yang digunakan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I. Adapun saran diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, baik dalam perbaikan aplikasi e-BMD maupun dalam penguatan tata kelola barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.